BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum memang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi adakalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang bisa membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.¹ Faktor yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah bahwa pada umumnya tindak pidana korporasi pada hakikatnya adalah tindak pidana yang tidak kasat mata, baik karena *highly organized* dan didukung oleh kaum profesional yang andal untuk menyembunyikannya, ataupun karena yang terlihat di latar adalah bisnis rutin sehari-hari. Tentunya tidak semua tindak pidana korporasi seperti ini, kecuali manakala suatu korporasi memang sengaja dibangun untuk menjadi *criminal corporation*, dan umumnya terlibat dalam *organized crime*.²

Tindak pidana korporasi juga dapat dipahami merupakan suatu kejahatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi khususnya

¹ Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*, Rajawali Pers, Depok, 2024, hlm. 101.

² Harkristuti Harkrisnowo, *Redefinisi Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2019, hlm. 510.

dengan para eksekutif atau pengurus korporasi. Mereka memiliki perilaku menyimpang dengan kewenangan tinggi dalam suatu korporasi dan menggunakan posisi jabatan mereka sebagai alat untuk melanggar hukum.³

Dalam kejahatan korporasi (*corporate crime*) unsur-unsur yang kerap ditemui adalah:⁴

- a. Kecurangan(*deceit*);
- b. Penyesatan(*misrepresentation*);
- c. Penyembunyian kenyataan(*concealment of facts*);
- d. Manipulasi;
- e. Pelanggaran kepercayaan(*breach of trust*);
- f. Akal-akalan (*subterfuge*);
- g. Pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.

Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku (KUHP Kolonial),⁵ tentu telah diatur bahwa orang-perorangan melakukan suatu kejahatan pastinya akan ada sanksi pidana padanya, namun KUHP Kolonial belum mengatur adanya sanksi pidana bagi korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana. KUHP Kolonial menganut asas “*Delinquere Non Potest*” yakni badan hukum tidak dapat melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain

³ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

⁴ MI Aryaputra, *Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, 2013, hlm. 57.

⁵ KUHP Kolonial berasal dari Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch indie* (WvS NI) Staatsblad 1915 No. 732, yang terdiri dari 569 Pasal dan terbagi menjadi tiga buku, yaitu: Aturan Umum (*Algemeene bepalingen*), Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*) yang diterapkan Belanda di bumi nusantara dengan asas konkordansi.

KUHP Kolonial tidak menempatkan Korporasi sebagai subjek.⁶ Asas tersebut sebenarnya telah ditinggalkan seiring dengan berkembangnya model pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Hal ini juga dipertegas dengan berkembangnya *economic crimes* dan *white-collar crime* yang memiliki falsafah bahwa sukses dan keuntungan material merupakan kedua hal yang terpenting dalam kehidupan dan dalam mencapainya seorang tidak harus ragu-ragu untuk melakukan perbuatan tidak etis yang sebenarnya bertentangan dengan idealisme.⁷

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terbatas dalam ketentuan undang-undang di luar KUHP Kolonial. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai konsep mengenai makna dari korporasi yang berbeda-beda, antara lain sebagai kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, merupakan badan hukum dan bukan badan hukum. Ketidaksamaan dan ketidaksempurnaan dalam perundang-undangan tentang makna korporasi mengakibatkan kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi atau kejahatan yang bukan korporasi, baik dari sudut pandang pelaku maupun karakteristik dari kejahatan tersebut. Adapun beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi, antar lain:⁸

- a. *Crime for Corporation* merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku.

⁶ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Op. Cit.*, hlm 19.

⁷ Albert Aries, *Op. Cit.*, hlm 102.

⁸ H Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 21.

- b. *Crime Against Corporation* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi tersebut.
- c. *Criminal Corporation* merupakan korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi di sini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yang dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa badan hukum dapat dipidana secara terpisah dari pengurusnya. Korporasi sebagai subjek hukum pidana kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE), yang dalam Pasal 15 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan merupakan subjek hukum yang dapat dipidana.

Pada tahapan selanjutnya, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia berlangsung secara terpisah-pisah dan menggunakan istilah yang beragam pada undang-undang khusus lainnya. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada Pasal 1 angka 23 “pihak” menyebutkan adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Demikian juga Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik menggunakan istilah

“korporasi”. Korporasi diartikan sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-undang dengan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta beberapa undang-undang di luar KUHP lain.

Ketidakeragaman makna korporasi sebagai subjek hukum yang merupakan akibat dari tidak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP Kolonial mengakibatkan ketidakpastian dalam implementasi pemidanaannya. Dengan demikian, hukum pidana harus dapat mengambil perannya sebagai instrumen dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas maraknya tindak pidana korporasi yang terjadi dewasa ini. Berbeda dengan KUHP Kolonial yang hanya mengenal subjek hukum manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana atau subjek hukum. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam

KUHP Nasional, turut mengubah “wajah” sistem pemidanaan di Indonesia yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang.⁹

Paradigma baru yang diusung pada KUHP Nasional adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keindonesiaan dengan jalan menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama yaitu dengan mengejawantahkan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif dalam Buku Kesatu sebagai “operator” (*control mechanisms*) dari Buku Kedua dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di Luar KUHP, perumusan Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (*Guidelines and Objectives of Sentencing*) dan memuat alternatif Sanksi Pidana selain dari Pidana Penjara, misalnya Pidana Denda, Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial. Mengenai keadilan korektif tujuannya adalah untuk memperbaiki kelakuan yang salah dari pelaku dengan cara mengoreksi perbuatannya, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan pelaku dari rasa bersalah melalui pemidanaan. Selanjutnya keadilan rehabilitatif ditujukan untuk pelaku dan korban tindak pidana, sementara keadilan restoratif ditujukan untuk korban melalui pendekatan restitusi secara aktif yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana untuk memperoleh pemulihan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁰ Atau dengan kata lain, pemidanaan bukan lagi hanya sebagai pembalasan belaka (keadilan retributif) kepada pelaku tindak pidana yang sering memberikan kesan acuh terhadap korban, namun lebih dari itu KUHP Nasional memperhatikan segala aspek dari posisi pelaku dan korban dari tindak pidana.

⁹ Muhammad Iftar Arya Putra, *Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi dalam KUHP Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 52, Nomor 2, 2023, hlm. 209.

¹⁰ Albert Aries, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Dalam Bab II Paragraf 3 KUHP Nasional telah diperkenalkan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga selain orang perseorangan telah ada penegasan bahwa korporasi juga merupakan subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional). Hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap warga masyarakat atas kejahatan yang semakin terorganisir yang bersifat domestik maupun transnasional dimana korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*). Selain itu dalam KUHP Nasional juga ditemukan pengaturan tentang implementasi pertanggungjawaban korporasi yaitu sebagaimana dalam Paragraf 3, Pasal 45 ayat (2) KUHP Nasional sampai Pasal 50 KUHP Nasional. KUHP Nasional juga mengatur kualifikasi Pidana dan Tindakan Korporasi sebagaimana terdapat dalam Bagian Keempat, Pasal 118 sampai Pasal 124 KUHP Nasional. Terkait hal ini, Penulis akan memberikan uraian secara lebih terperinci pada bagian selanjutnya.

Selanjutnya, terkait dengan pedoman pidanaan terhadap korporasi diatur secara *detail* lingkup dari pedoman pidanaan sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP Nasional, yang berbunyi:

“Dalam pidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;*
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;*

- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.”

Terminologi keadilan restoratif tidak ditemukan dalam KUHP Nasional, namun pengaturan keadilan restoratif secara implisit terkandung dalam beberapa pembaruan asas-asas hukum pidana yang ada dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Penyesuaian Sanksi dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang menggunakan *modified delphie method*. Hal ini antara lain tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional yang pada pokoknya merumuskan pedoman pemidanaan (*guidelines of sentencing*) yaitu hakim jika mendapati pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan wajib mengutamakan keadilan. Kewajiban hakim untuk memperhatikan sikap batin pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban/keluarganya dan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. Selanjutnya, Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional menyatakan bahwa pemaafan peradilan, juga dikenal sebagai pemaafan peradilan, didasarkan pada tingkat keadilan dan kemanusiaan dari perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, serta peristiwa yang terjadi setelahnya.

Mengingat dampak pembedaan terhadap kejahatan korporasi sangat luas, baik dalam kaitannya dengan pendapatan pajak negara, nasib karyawan, pemegang saham, konsumen, dan sebagainya, ada pendapat bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai *primum remedium*. Hukum pidana digunakan sebagai pengganti. Dengan menerapkan sanksi alternatif yang dibatasi pada pelanggaran administratif dan delik formal yang bersifat *mala prohibita*, keadilan restoratif—juga dikenal sebagai keadilan restoratif—mungkin dapat diterapkan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan korporasi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana dan penerapan keadilan restoratif terhadap korporasi yang menjadi pelaku tindak pidana melalui penelitian dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan merupakan tolak ukur untuk fokus dalam penulisan karya ilmiah, dan menjadi penentu dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.¹² Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menarik rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Muladi, *Identifikasi Teoritik dan Konseptual Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sert Kebijakan Kriminal untuk Mengatasinya*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi serta Kebijakan Kriminal, Semarang, 2015, hlm. 20

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 204.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana ditinjau dari KUHP Kolonial dan KUHP Nasional?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis aspek-aspek penting terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan penerapan keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana korporasi. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:

Meneliti dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk dasar hukum dan teori yang relevan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana korporasi sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan.

2. Mengidentifikasi Prinsip dan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Kasus Korporasi.

Menggali prinsip-prinsip keadilan restoratif dan bagaimana mekanisme ini dapat diterapkan dalam konteks tindak pidana korporasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari keadilan restoratif yang relevan untuk kasus korporasi, termasuk kompensasi, dialog antara pelaku dan korban, serta reformasi internal.

3. Mengevaluasi Efektivitas Keadilan Restoratif dalam Mengatasi Kejahatan Korporasi

Menilai sejauh mana penerapan keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang efektif dan konstruktif dalam menyelesaikan kasus kejahatan korporasi. Penelitian ini akan mengevaluasi dampak keadilan restoratif terhadap perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta efektivitasnya dalam mengurangi risiko terulangnya kejahatan.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek hukum dan praktik terkait kejahatan korporasi. Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dan keadilan restoratif, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum dan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme keadilan restoratif dalam kasus kejahatan korporasi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, termasuk pengacara, hakim, dan penuntut umum, dalam menangani kasus kejahatan korporasi. Dengan memahami penerapan

pertanggungjawaban pidana dan mekanisme keadilan restoratif, praktisi hukum dapat lebih efektif dalam penyelesaian kasus.

3. Manfaat bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau mereformasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan prosedur yang dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan korporasi.

4. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak kejahatan korporasi dan pentingnya penerapan mekanisme keadilan restoratif. Dengan memberikan informasi yang lebih jelas tentang bagaimana keadilan restoratif dapat memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, penelitian ini dapat mendorong dukungan publik terhadap reformasi hukum dan praktik keadilan yang lebih adil.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum biasanya dianggap sebagai apa yang ditulis dalam undang-undang atau sebagai kaidah atau

norma yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang baik.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum adalah fokus utama dari jenis penelitian ini.

Sumber data yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan khususnya pada lingkungan Magister Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dan secara umum pada universitas lain di Indonesia maka belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13.

Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana”. Namun, terdapat beberapa penelitian tentang pidanaan korporasi antara lain penelitian yang dilakukan oleh:

1. Muhamad S. Mae, dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan”, Tesis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apakah proses penegakan hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan melalui pendekatan *restorative justice* dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara?
 - b. Apakah efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan negeri Bulungan melalui pendekatan *restorative justice*?

Penelitian ini fokus kepada penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *restorative justice* pada tatanan praktik di lingkungan Kejaksaan Negeri Bulungan dalam memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat sementara penulis akan meneliti bagaimana konsep *restorative justice* dalam KUHP Baru akan diterapkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana mencapai keadilan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

2. R. Budi Hartanto, dengan judul penelitian “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana oleh Kejaksaan”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2021, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif?
- b. Bagaimanakah efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana oleh Kejaksaan?

Penelitian ini fokus kepada kewenangan kejaksaan dalam mengimplementasikan *restorative justice* oleh pada penanganan perkara dan bagaimana efektivitasnya sedangkan peneliti akan mempersempit fokus penelitian menjadi konsep *restorative justice* yang diimplementasikan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi serta bagaimana keadilan bagi pihak yang terlibat dalam implementasi *restorative justice* tersebut.

3. Mujiono, dengan judul penelitian “Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Tesis Magister Hukum Universitas Jember, Jember, 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum terhadap tindak pidana kejahatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
- b. Bagaimana formulasi korporasi sebagai subjek hukum dalam prospektif pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan lingkungan hidup?

Penelitian ini mempelajari korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam konteks tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya, peneliti akan meneliti bagaimana KUHP Baru menetapkan korporasi sebagai subjek tindak

pidana dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat diterapkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁴ Dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini akan mempergunakan dua teori, yaitu: Teori tentang keadilan; dan teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

a. Teori Keadilan

Konsep keadilan atau dalam bahasa inggris disebut *justice*, memiliki beberapa garis besar seperti berikut:¹⁵

- 1) Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*);
- 2) Tidak memihak (*impartiality*);
- 3) Representasi yang layak atas fakta (*Fair*);
- 4) Kualitas untuk menjadi benar (*correct to right*);
- 5) Alasan yang logis (*sound reason*).

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 91.

¹⁵ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 118

Selain *justice* kata yang sering dikaitkan dengan keadilan ialah *equality* yang diartikan sebagai:¹⁶

- 1) Keadilan yang tidak memihak (*impartial justice*);
- 2) Memberikan hak yang setara kepada semua orang;
- 3) Prinsip umum tentang kelayakan dan keadilan dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas.

Para filsuf juga membuat teori dan pendapat tentang keadilan. Dalam Etika Nichomachea, Aristoteles membahas pendapatnya tentang keadilan. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum (hukum polis yang ditulis dan tidak ditulis pada waktu itu). Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan umum. Theo Huijbers menguraikan Aristoteles tentang keadilan sebagai keutamaan moral khusus selain keutamaan umum. Menurutnya, keadilan berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, misalnya, menentukan hubungan yang baik antara orang-orang dan menjaga keseimbangan antara dua pihak. Aristoteles menganggap keadilan sebagai kesamaan numerik dan proporsional. Setiap individu sama dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian, secara proporsional, setiap orang diberikan hak-haknya sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.¹⁷

Aristoteles juga membedakan keadilan korektif dan distributif. Dia percaya bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum

¹⁶ Ibid, hlm. 119

¹⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

publik yang berfokus pada pembagian, penghormatan, dan distribusi kekayaan dan aset lainnya yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Kemudian, keadilan korektif berarti memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada orang yang dirugikan, atau menghukum pelaku kejahatan dengan cara yang pantas. Sehingga dapat disebutkan bahwa Aristoteles menganggap ganti rugi dan sanksi sebagai keadilan korektif. Theo Huijbers mengemukakan teori keadilan Aristoteles sebagai berikut:¹⁸

- (a) Keadilan dalam pembagian kekayaan publik dan jabatan Di sini, kesamaan geometris berlaku. Misalnya, seorang bupati memiliki posisi yang lebih penting daripada seorang Camat, dan karena itu, bupati harus mendapatkan kehormatan yang dua kali lebih besar daripada Camat. Mereka yang sama penting, dan mereka yang tidak sama penting.
- (b) Keadilan dalam penjualan Dia berpendapat bahwa kedudukan para pihak menentukan harga barang. Ini saat ini tidak dapat diterima.
- (c) Keadilan sebagai kesamaan aritmetik baik dalam domain privat maupun publik Orang yang mencuri harus dihukum, tidak peduli siapa yang mencuri. Semua pejabat harus dihukum jika terbukti melakukan korupsi.
- (d) Keadilan dalam konteks penafsiran hukum. Hakim harus menafsirkan undang-undang seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa tertentu karena undang-undang itu bersifat umum dan tidak

¹⁸ *Ibid*, hlm. 242

meliputi semua persoalan khusus. Aristoteles mengatakan bahwa hakim harus memiliki "suatu rasa tentang apa yang pantas".

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹⁹

- (a) Pilihan yang adil juga menyebabkan keadilan ini. Ini berasal dari gagasan Rawls bahwa orang-orang di masyarakat tidak tahu posisi mereka yang asli, tujuan dan tujuan hidup mereka, dan dari generasi mana mereka berasal. Dengan kata lain, anggota masyarakat itu tidak jelas. Akibatnya, orang-orang kemudian memilih prinsip keadilan.
- (b) Keadilan sebagai keadilan menghasilkan keadilan prosedural murni. Tidak ada aturan yang membedakan apa yang dianggap "adil" dari prosedur. Keadilan adalah sistem, bukan hasil.

Thomas Hobbes mengatakan bahwa keadilan adalah ketika suatu tindakan dapat dianggap adil jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Ketika dua pihak yang berjanji mencapai kesepakatan, keadilan atau rasa keadilan baru dapat dicapai. Di sini, perjanjian tidak hanya berarti perjanjian antara dua pihak yang melakukan bisnis, sewa-menyewa, atau hal-hal lainnya; itu juga berarti perjanjian tentang jatuhnya putusan hakim dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 246-247

terdakwa, peraturan hukum yang bekerja sama untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan satu pihak.²⁰

Roscoe Pound melihat keadilan dalam manfaatnya bagi masyarakat. Ia percaya bahwa hasilnya harus mencakup memenuhi kebutuhan manusia dengan sedikit pengorbanan. Pound menyatakan bahwa dia senang melihat "semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan, atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; usaha untuk menghapus pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif."²¹

Hans Kelsen memandang keadilan sebagai hasil dari penerapan norma hukum yang sesuai dengan sistem hukum yang ada, bukan sebagai kualitas intrinsik dari hukum itu sendiri. Dalam teori murni hukum Kelsen, keadilan diartikan sebagai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus konkret, dengan pemisahan yang jelas antara hukum dan moralitas.²²

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 201, hlm. 92-94.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori selanjutnya yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal beberapa teori yaitu:

1) Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, juga dikenal sebagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Menurut teori ini, korporasi bertindak atas nama dan/atau untuk korporasi jika melakukan delik secara langsung melalui agen yang sangat dekat dengan korporasi. Mereka tidak bertindak sebagai pengganti, dan oleh karena itu, tanggung jawab korporasi bukanlah tanggung jawab pribadi. Karena tindakan para agen tersebut masih berada dalam lingkup tanggung jawab korporasi, korporasi harus bertanggung jawab pidana secara langsung.²³

2) Teori *Strict Liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.²⁴ Pertanggungjawaban mutlak berarti pertanggungjawaban tanpa kesalahan, atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dengan cara yang sama, konsep pertanggungjawaban mutlak didefinisikan sebagai sifat

²³ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm 52.

²⁴ *Ibid*

pelanggaran mutlak adalah bahwa mereka adalah pelanggaran yang tidak membutuhkan adanya unsur kesalahan dari sudut pandang salah satu elemen dari mereka "*actus reus*".

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:²⁵ “Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*”.

Hanya dugaan atau pengetahuan terdakwa yang diperlukan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability*. Karena unsur utama tanggung jawab tegas adalah *actus reus*, atau perbuatan, maka yang harus dibuktikan adalah *actus reus*, bukan *mens rea*. Oleh karena itu, tidak dipersoalkan adanya *mens rea*.²⁶

3) Teori *Vicarious Liability*

Vicarious liability, juga dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti, mengacu pada kewajiban hukum seseorang untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Babak Nawawi Arief, pertanggungjawaban akibat adalah konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang masih

²⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 75.

²⁶ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. Cit*, hlm 2.

berada dalam lingkup pekerjaannya (pertanggungjawaban hukum seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya).²⁷

c. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam penyelesaian tindak pidana, pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat, terutama pelaku dan korban, untuk berpartisipasi. Dengan demikian, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh penegak hukum. Menurut perspektif ini, penjatuhan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal ini, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih jenis penyelesaian perkara yang memegang teguh kepentingan mereka.²⁸

Tiga prinsip dasar yang mendasari konsep *restorative justice* adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Pemulihan kepada korban (*Restoration to those injured*): Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama *restorative justice* adalah memulihkan keadaan para korban yang menderita kerugian akibat kejahatan. Pemulihan ini dapat berupa ganti rugi material, psikologis, atau emosional. Fokusnya

²⁷ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm 63-64.

²⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

²⁹ *Ibid.*

adalah memperbaiki dampak negatif yang dialami korban dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.

- b. Kesempatan bagi pelaku untuk berpartisipasi dalam pemulihan (*Offender involvement in restoration*): Prinsip ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam proses pemulihan. Jika pelaku menginginkan, mereka dapat turut serta dalam upaya memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Hal ini bisa diwujudkan melalui permintaan maaf, ganti rugi, atau upaya lain yang menunjukkan tanggung jawab mereka atas tindakan yang dilakukan. Keterlibatan pelaku ini berpotensi mengurangi siklus kejahatan dengan memberikan pelajaran bagi mereka dan membantu dalam reintegrasi ke dalam masyarakat.
- c. Peran pengadilan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keadilan (*Role of courts and community*): Dalam prinsip ini, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat berperan dalam menjaga perdamaian yang adil. *Restorative justice* menggabungkan peran institusi formal dan komunitas dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil untuk masalah kejahatan. Masyarakat berperan aktif dalam proses ini, baik sebagai pendukung korban maupun pelaku, untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan.

Ketiga prinsip ini menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kejahatan, di mana pemulihan korban, partisipasi pelaku, dan peran masyarakat menjadi pilar utama dalam mencapai keadilan yang lebih adil dan seimbang.

Model pendekatan keadilan restoratif muncul didasarkan atas ide-ide yang mengkritisi bahwa penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan dianggap sudah tidak efektif lagi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Keadilan restoratif ini sebagai upaya alternatif di dalam sistem peradilan pidana tentunya dalam hal ini akan memberikan tawaran melalui pendekatan secara integral antara pelaku dengan korban untuk mencari berbagai solusi atau jalan keluar yang terbaik di antara kedua belah pihak.³⁰ Perbaikan yang dimaksud dalam hal ini akan menekankan dengan melakukan penggantian kerugian yang diperbuat oleh pihak pelaku.³¹

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh John Braithwaite, ia mengatakan bahwa tujuan utama dari *restoratif justice* adalah perbaikan yang diperbuat oleh pelaku serta dalam hal ini tidak pula mengesampingkan hak-hak dari korban sebagai pihak yang dirugikan melalui konsiliasi dan rekonsiliasi di kalangan pelaku, korban dan masyarakat. Alternatif penyelesaiannya dalam hal ini lebih memfokuskan kepada perdamaian antara korban dan pelaku yang sifatnya *win-win solution* dan pada akhirnya tentu akan memberikan keadilan substantif bukan hanya hukum yang berkuat di teks semata. *Law Enforcement* melalui *Criminal Justice System* hanyalah mengutamakan aspek kepastian hukum semata tanpa memandang aspek keadilan serta kemanfaatan untuk masyarakat. Padahal penegakan hukum yang hanya berpatokan pada Undang-

³⁰ Duwi Aryadi, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila", *Al-Daulah*, Vol. 09, No. 02, Desember 2020, hlm, 138-143.

³¹ *Ibid.*

Undang dalam hal ini yang dicapai hanyalah kepastian hukum justru akan mengakibatkan hukum itu kehilangan makna (*meaning*) yang sesungguhnya, dalam hal ini tujuan hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang memberikan rasa kebahagiaan, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak asasi Manusia.³²

2. Kerangka Konseptual

Untuk menunjang kerangka teori sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini diberikan penjabaran mengenai beberapa konsep yang sering digunakan, antara lain:

a. Subjek Hukum

Hukum pidana pada prinsipnya untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati dan ditaati oleh setiap orang. Kepentingan hukum mencakup tiga hal, yaitu kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau perbuatan yang masuk rumusan hukum pidana disebut dengan tindak pidana atau delik. Salah satu unsur tindak pidana adalah harus ada pelaku tindak pidana. Bila diperhatikan pengertian dari tindak pidana maka salah satu syaratnya harus ada perbuatan manusia (*natuurlijke persoon*). Akan tetapi dalam perkembangannya ada subjek hukum pidana yang bukan manusia yaitu korporasi (*recht persoon*).³³

b. Korporasi

³² Yohanes Surhadin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum:", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 02, 2009, hlm. 342.

³³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 14.

Kata "korporasi" (dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata latin "*korporatio*". *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*", yang berarti "memberikan badan" atau "*membadankan* badan". Dengan demikian, *korporare* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, atau badan yang dijadikan orang. Badan ini diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³⁴

Banyak pakar hukum telah membuat definisi tentang korporasi. Sebagai contoh, menurut Subekti dan Tjitrosudibo, "korporasi" atau "korporasi" adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Namun, menurut Yan Pramadya Puspa, "korporasi atau perseroan" adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang diatur oleh hukum seperti seorang individu (atau pemilik) menjalankan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum." Contoh badan hukum adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*), bahkan negara.

G. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

³⁴ Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 23.

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjabarkan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang penulisan penelitian ini, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan literatur hukum mengenai pemahaman umum secara akademis dan akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan keadilan restoratif terhadap korporasi pelaku tindak pidana.

3. Bab III Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kurun waktu sebelum dan setelah KUHP Nasional.

4. Bab IV Keadilan Restoratif Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Bab ini akan menguraikan mengenai efektivitas penyelesaian perkara pidana berdasar pada keadilan restoratif terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana.

5. Bab V Penutup

Pada bagian bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran. Bahwa bab ini merupakan penutup dari semua hal-hal yang telah dibahas atau diteliti dalam bab-bab sebelumnya.